



Research Article

Implications of Russia's Aggression Against Ukraine for its Membership at the UN Human Rights Council

Vanesha Salsabila Keisy

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia; vaneshasalsabila2004@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2025
Accepted : April 15, 2025

Revised : March 21, 2025
Available online : May 15, 2025

How to Cite: Vanesha Salsabila Keisy. (2025). Implications of Russia's Aggression Against Ukraine for its Membership at the UN Human Rights Council. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(2), 113-135. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i2.160>

Abstract. Russia has engaged in military operations leading to aggression since 2014 on the Crimean peninsula, culminating in Russia opposing Ukraine's desire to join the North Treaty Organization (NATO) in 2022. Russia is a member state in the UN Human Rights Council since 2020, as a result of violating human rights has resulted in Russia's membership status in the UN Human Rights Council being suspended. In accordance with the provisions of the establishment of the UN Human Rights Council through the UN General Assembly Resolution, namely MU-UN Resolution 60/251 entitled "UN General Assembly Resolution: Human Rights Council". The problems in this study, namely: How is Russian aggression against Ukraine based on international law. What are the implications of Russia's aggression on its membership status in the UN Human Rights Council. The research method is based on descriptive normative juridical research and the data is analyzed in qualitative terms. The results of the research are drawn conclusions: Russian aggression against Ukraine based on international law has violated several provisions of international law, namely the UN Charter in Article 62 paragraph (2), the 1998 Rome Statute in Article 5 and Article 8 bis, the 1949 Geneva III Convention especially Chapter II Articles 13, 14, 15, the Geneva IV Convention, and several UN General Assembly Resolutions. The implications of Russia's aggression against Ukraine caused Russia's membership status in the UN

Human Rights Council to be suspended based on UN Resolution 60/251 of 2006, especially in paragraph 8.

Keywords: Aggression, Russian Membership, United Nations Human Rights Council.

Abstrak. Rusia melakukan operasi militernya hingga berujung agresi sudah sejak 2014 di semenanjung Krimea, kemudian puncaknya Rusia menentang keinginan Ukraina bergabung dengan North Treaty Organization (NATO) pada tahun 2022. Rusia merupakan salah satu negara anggota di Dewan HAM PBB sejak 2020, sebagai akibat dari tindakan melanggar HAM telah berimbas kepada status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB ditangguhkan. Sesuai ketentuan pembentukan Dewan HAM PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 yang berjudul "UN General Assembly Resolution: Human Rights Council". Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah agresi Rusia terhadap Ukraina berdasarkan hukum internasional. Bagaimanakah implikasi agresi yang dilakukan Rusia terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan data dianalisis kualitatif. Hasil penelitian ditarik kesimpulan: Agresi Rusia terhadap Ukraina berdasarkan hukum internasional telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu Piagam PBB Pasal 62 ayat (2), Statuta Roma 1998 pada Pasal 5 dan Pasal 8 bis, Konvensi Geneva III 1949 khususnya Bab II Pasal 13, 14, 15, Konvensi Geneva IV, dan beberapa Resolusi Majelis Umum PBB. Implikasi Agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menyebabkan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB ditangguhkan berdasarkan Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006 khususnya pada paragraf 8.

Kata-kata Kunci : Agresi, Keanggotaan Rusia, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

INTRODUCTION

Sejak dibentuknya *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB), agresi telah menjadi isu penting yang mendapat perhatian khusus.¹ Setelah perjuangan panjang lebih dari *dua dekade*, definisi Agresi perlahan mulai jelas berkat upaya para pakar hukum dan politik.² Pembahasan tentang agresi dimulai di Komisi Hukum Internasional dan melalui Komite khusus yang dibentuk oleh PBB. Setelah melalui proses perumusan, Majelis Umum PBB menyepakati definisi agresi yang terdiri dari 8 pasal. Kesepakatan ini disetujui secara aklamasi pada sidang 14 Desember 1974 dan diresmikan dalam Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX) berjudul "*Definition of Aggression*". Pasal 1 dalam resolusi tersebut menjelaskan agresi diartikan sebagai:

"Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition."

Terjemahan: Agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata suatu negara terhadap kedaulatan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan Piagam PBB seperti tersebut dalam definisi ini".

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2005, "Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3, No. 1

² Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 51.

Kejahatan agresi terjadi ketika seseorang dengan kekuasaan efektif dalam menentukan kebijakan politik atau militer suatu negara melakukan tindakan yang melanggar Piagam PBB. Contoh nyata dari hal ini adalah serangan Rusia ke Ukraina. Pada 24 Februari 2022, militer Rusia memasuki wilayah Ukraina atas perintah Presiden Vladimir Putin, yang secara resmi mengumumkan dimulainya *special military operation* (operasi militer khusus) di Ukraina.³ Rusia melakukan serangan berskala besar tersebut di semenanjung Krimea sudah sejak 27 Februari 2014. Setelah masalah di Krimea, Agresi Rusia tidak berhenti sampai di situ. Rusia juga melakukan agresi militer ke Ukraina bagian timur, yakni ke wilayah Luhansk dan Donesk. Rusia dan Ukraina kembali terlibat dalam konflik bersenjata pada tahun 2022. Rusia menentang keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa bersamaan dengan keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Rusia berupaya membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan pengaruh Amerika Serikat dan juga berusaha mempertahankan hubungan dekat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet.⁴

Data dan sejumlah bukti yang didapatkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) melalui Kepala Jaksa ICC yang melakukan investigasi terhadap kejahatan agresi di Ukraina atas permintaan dari 39 negara pada Maret 2022 lalu, dan Investigator PBB melalui Komisi Penyelidikan PBB atau *The Independent International Commission of Inquiry* (COI) telah temukan semakin banyak bukti kejahatan agresi Rusia di Ukraina, pada Juni 2023 lalu.⁵ Tindakan Rusia menurut ICC dianggap telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu: Piagam PBB, Statuta Roma 1998, Konvensi Genewa 1949, protokol tambahan 1977 dan beberapa ketentuan lainnya seperti Resolusi-resolusi, Piagam PBB yang khususnya prinsip kedaulatan negara pada Pasal 2 ayat (4). Meskipun Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan, ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 51, yang memungkinkan negara untuk bertindak jika diserang. Ini menjadi pengecualian terhadap larangan Pasal 2 ayat (4) yang melarang ancaman atau kekuatan yang mengancam wilayah negara. Pasal 51 menegaskan hak negara untuk membela diri dari serangan yang membahayakan kedaulatan politiknya.⁶

Rusia yang merupakan salah satu negara anggota di Dewan HAM PBB sejak 2020 dan mulai terhitung sejak Januari 2021 lalu, dengan adanya dugaan pelanggaran HAM tersebut telah berimbas kepada status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB menjadi ditangguhkan. Sesuai dengan ketentuan pembentukan Dewan HAM PBB

³ President of Russia, "Message from the President of the Russian Federation," <http://kremlin.ru/events/president/news/67843>, dikunjungi pada tanggal 14 September 2024 Jam 13.31.

⁴ Reuters, "U.S. dismisses Russian claims of biowarfare labs in Ukraine," www.reuters.com/world/russia-demands-us-explain-biological-programme-ukraine-2022-03-09, dikunjungi pada tanggal 1 September 2024 jam 13.23.

⁵ BBC News Indonesia, "Rusia-Ukraina: Tindakan apa saja yang termasuk kejahatan perang?," <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60613803>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2024 Jam 12.45.

⁶ Alexander Orakhelashvili, 2016, "Changing Jus Cogens through State Practice? – the Case of the Prohibition of the Use of Force and its Exceptions," dalam Marc Weller, Ed., *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford University Press, hlm. 72 & 860.

sendiri melalui sebuah Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 yang berjudul “*UN General Assembly Resolution : Human Rights Council*”, di paragraf 8 (delapan) mengatur tentang Mekanisme pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Dilakukannya penangguhan Keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB Pada 7 April 2022 lalu, merupakan sebagai respon atas penemuan mayat-mayat warga sipil di kota Bucha dekat Kyiv dengan total 300 mayat ditemukan bergelimpangan. Majelis Umum PBB menanggukhan Rusia dari Dewan HAM PBB melalui sebuah resolusi yang berjudul “*Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*” dengan kode (A/ES-11/L.4), hampir dua bulan setelah Rusia melancarkan kekuatan militernya di Ukraina dan dua tahun setelah terpilihnya Rusia menjadi anggota Dewan HAM PBB pada Oktober 2020.⁷

Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang di prakarsai oleh Amerika Serikat tersebut yang menyerukan “*grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine.*” Keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari dua per tiga anggota yang memberikan suara, dalam sebuah Majelis yang terdiri dari 193 negara. Sebanyak 93 negara mendukung, sementara 24 negara menolak, dan 58 negara memilih abstain. Pada Selasa, 10 Oktober 2023, Majelis Umum PBB yang diadakan di General Assembly Hall, Markas Besar PBB di New York, menggelar pemungutan suara ulang terkait kemungkinan Rusia bergabung kembali dengan Dewan HAM PBB. Rusia kalah dalam pemungutan suara ulang tersebut, hanya mendapatkan 83 suara, sementara Bulgaria mendapatkan 160 suara dan Albania meraih 123 suara. Kegagalan ini dianggap sebagai bias dari resolusi penangguhan Rusia dan sebagai sinyal kuat dari negara-negara anggota PBB bahwa negara yang bertanggung jawab atas kejahatan Agresi tidak pantas berada di Dewan HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana agresi militer Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional? dan Bagaimanakah implikasi agresi yang dilakukan Rusia terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB?

RESEARCH METHODS

Spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah hukum normatif (*Normative Law Research*), Pendekatan penelitian hukum doctrinal yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu The United Nations Charter 1945, The Geneva Conventions and their Additional Protocols 1949, UN General Assembly Resolution 3314(XXIX) of 1974 Definition of Aggression, The Rome Statue of the International Criminal Court 1998, UN General Assembly Resolution 60/251 of 2006 Human Rights Council, UN General Assembly Resolution A/ES-11/L.4 of 2022 Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council, UN General Assembly Resolution A/RES/ES-11/1 of 2022 Aggression against Ukraine, dan bahan hukum sekunder Hasil-hasil penelitian,

⁷ AL JAZEERA, “*UN suspends Russia from human rights body: How your country voted,*” <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/8/russia-suspended-from-un-human-rights-body-how-countries-voted>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober November 2024 Jam 10.20 WIB

Pendapat para pakar hukum, Buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum. Data yang telah terkumpul disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan kerangka regulasi berupa peraturan-peraturan atau norma-norma yang terkait dengan beberapa permasalahan yang diteliti sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan.

RESULTS AND DISCUSSION

Agresi Militer Rusia terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional

Agresi merupakan salah satu tindakan yang sangat dilarang karena berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian internasional.⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) "Piagam PBB menjelaskan bahwa tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB." Berikut penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut:

"Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Pelarangan dan kriminalisasi agresi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah tertentu atau upaya mengganggu kebebasan suatu negara harus dihentikan segera, dan penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara *damai*, guna tercapainya perdamaian dan keamanan global yang menjadi tujuan utama PBB, kecuali dalam konteks pembelaan diri.⁹ Hal ini juga tercermin dalam Pasal 3 yang menjelaskan berbagai bentuk agresi yang dapat mengancam kedaulatan negara lain berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tahun 1974, hal tersebut ditegaskan lebih lanjut.

Article 3:

"Invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara terhadap wilayah Negara lain, atau setiap pendudukan militer, betapapun sementaranya, yang diakibatkan oleh invasi atau serangan tersebut, atau setiap pencaplokan dengan menggunakan kekerasan terhadap wilayah Negara lain atau bagian daripadanya..."

Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggung jawab saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Bab VII Pasal 51 Piagam PBB, yaitu mengenai Hak Pembelaan (*Self Defense*):

"Tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak yang melekat pada hak pembelaan diri perorangan atau kolektif apabila terjadi serangan bersenjata terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara

⁸ Tom Dannenbaum, 2018, *The Crime of Aggression, Humanity, and the Soldier*, Lieblich, Cambridge University Press.

⁹ KGP. Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 57-60.

perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Anggota dalam pelaksanaan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara apa pun...”

Prinsip hak untuk membela diri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Istilah *self-defense* atau pembelaan diri sudah lama diakui dalam praktik hukum internasional sebagai suatu kebiasaan yang diterima. Konsep ini pertama kali terwujud dalam hukum internasional pada tahun 1837 melalui insiden yang dikenal sebagai *Caroline Case*, yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris. Peristiwa tersebut berawal dari penembakan terhadap kapal *Caroline* milik Amerika oleh pasukan Inggris. Penembakan itu dilakukan karena kapal tersebut memasok senjata maupun kebutuhan kelompok teroris dan warga Amerika Serikat yang menentang pemerintahan dan melakukan serangan terhadap teritorial Canada.¹⁰ Hal ini memunculkan hubungan diplomatik yang membentuk pemahaman tentang pembelaan diri. *Self defense* dalam *Caroline doctrine* mengenal dua prinsip sehingga penggunaannya dianggap sah, yaitu:¹¹

1. *Necessity*, keharusan negara untuk bertahan dengan kekerasan karena tidak adanya jalan lain untuk mempertahankan kedaulatannya. Penggunaan kekuatan harus menjadi satu-satunya pilihan yang layak untuk menghentikan atau menangkis serangan.

2. *Proportionality*, kesetaraan penggunaan kekuatan dalam melaksanakan prinsip *self defense* baik dari skala, durasi, dan intensitas pembelaan diri harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Perang antara Rusia dan Ukraina memicu perdebatan mengenai pembenaran penggunaan kekuatan sesuai Piagam PBB, khususnya terkait hak pembelaan diri (*self-defense*). Rusia mengklaim bahwa serangannya bertujuan untuk melindungi warga etnis Rusia di Donbas yang berbatasan langsung dengan Rusia. Rusia tidak meminta izin ke Dewan Keamanan PBB karena adanya hak veto dari negara yang mendukung Ukraina. Sebagai dasar, Rusia mengutip Pasal 51 Piagam PBB, yang memberi hak pembelaan diri. Pada 24 Februari 2022, Rusia mengirimkan pemberitahuan ke PBB dan Dewan Keamanan mengenai operasi militer yang dilakukan berdasarkan Pasal 51 tersebut.¹² Surat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum Rusia untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB terkait operasi militernya. Hanya ada referensi kepada pidato Presiden Putin pada 24 Februari 2022 yang disertakan. Pidato ini memberikan wawasan mengenai alasan Rusia dalam mengklaim hak membela diri. Putin berusaha menyampaikan pesan kepada warga Rusia, Ukraina, militer

¹⁰ D. J. Harris, 2004, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London : Sweet & Maxwell, Hlm. 889.

¹¹ Yusman Sumantri, 2010, *Kajian yuridis pasal 51 United Nations Charter tentang Self defence dalam kaitannya dengan kedaulatan suatu negara*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, hlm, 235.

¹² United Nations, Security Council, “Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General,” New York: UN Headquarters.

kedua negara, dan komunitas internasional, dengan menekankan bahwa Ukraina merupakan ancaman yang harus dihilangkan.¹³

Aksi militer yang dilakukan oleh Rusia dapat dipahami sebagai bentuk penerapan kekuatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Rusia berargumen bahwa langkah tersebut diambil sebagai reaksi terhadap ancaman yang dianggap melebihi ambang batas, yang dipicu oleh berkembangnya pengaruh NATO di wilayah Eropa Timur.¹⁴ Setelah peristiwa aneksasi tahun 2014 dan adanya dugaan dukungan militer Rusia untuk gerakan separatis di timur Ukraina, pemerintah Ukraina mulai memprioritaskan langkah Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Pada bulan Februari 2019, parlemen Ukraina memilih untuk mengubah Konstitusi Ukraina untuk menyatakan tujuan Ukraina menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Pada Brussel Summit bulan Juni 2021, para pemimpin NATO menegaskan kembali keputusan yang diambil pada Bucharest Summit 2008 bahwa Ukraina pada akhirnya akan menjadi anggota NATO dan Ukraina berhak untuk menentukan masa depan dan kebijakan luar negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Namun, pada akhirnya konflik bersenjata mengalami eskalasi pada tanggal 22 Februari 2022 ketika Rusia mengumumkan operasi militer khusus terhadap Ukraina.¹⁵

Dalam operasi militer khusus diketahui bahwa pasukan militer Rusia dengan cepat memperluas kehadirannya di seluruh wilayah Ukraina sejak 24 Februari 2022. Peristiwa tersebut diikuti dengan bentrokan militer antara Rusia dan Ukraina di sejumlah wilayah Ukraina. Pasukan militer Rusia juga telah melakukan serangan roket yang menargetkan bandara dan instalasi militer di Ukraina. Pasukan militer Rusia di darat menggunakan rudal dan artileri jarak jauh saat mereka bergerak maju ke daratan Ukraina. Terdapat juga peningkatan pergerakan dari pasukan militer Ukraina di sekitar kota Kherson, termasuk truk, trailer, kendaraan komando dan kendali, serta kapal tanker bahan bakar.¹⁶

Melalui pernyataan-pernyataan dari Presiden Putin dan otoritas Rusia dapat dilihat beberapa klaim ancaman yang dihadapi oleh Rusia: *Pertama*, alasan melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk) yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Tidak hanya mengklaim hak pembelaan diri atas ancaman terhadap negaranya, Rusia juga mengklaim hak pembelaan diri kolektif pada pengakuannya atas dua wilayah separatis di wilayah Donetsk dan

¹³ Sofia Cavandoli dan Gary A. Wilson, 2022, "Distorting Fundamental Norms of International Law to Resurrect the Soviet Union: The International Law Context of Russia's Invasion of Ukraine," *Netherlands International Law Review*, hlm. 387

¹⁴ James A. Green, Christian Henderson dan Tom Ruys, 2022, "Russia's Attack on Ukraine and the *Jus Ad Bellum*," *Journal on the Use of Force and International Law*, Vol. 9 No. 1, hlm. 6.

¹⁵ NATO, "Brussels Summit Communiqué," https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 Jam 20.22.

¹⁶ Sky News, "Russia launches invasion of Ukraine-Putin's troops 'seize control' of Chernobyl nuclear disaster site," <https://news.sky.com/story/russia-launches-invasion-of-ukraine-forces-trying-to-seize-site-of-chernobyl-nuclear-disaster-12550026#>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 Jam 20.48.

Luhansk, sebagai negara berdaulat.¹⁷ Presiden Rusia, Putin mengakui menandatangani pengakuan kemerdekaan dua wilayah di Ukraina pro-Rusia tersebut. Kedua wilayah ini merupakan daerah separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Rusia.¹⁸

Kedua, puncaknya agresi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada tahun 2022 karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Rusia mengklaim bahwa agresi dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang dianggap melanggar batas yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO ke Eropa Timur. Ancaman ini diidentifikasi dengan jelas oleh Presiden Putin sebagai ancaman eksistensial terhadap Rusia. Diawali ketika Presiden Petro Poroshenco, presiden ke-5 Ukraina yang terpilih pada tahun 2014, membentuk parlemen yang Pro Terhadap Uni Eropa (pro-Barat). Pergantian pemerintahan di Ukraina membuat Rusia mengirimkan pasukan bersenjata untuk menguasai bandara dan titik-titik penting di Krimea. Setelah itu, Krimea pun resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia berdasarkan hasil pemungutan suara. Pada dasarnya, Rusia mengakui bahwa setiap negara berhak untuk memilih sistem keamanannya sendiri dan masuk ke dalam suatu aliansi militer. Namun, Rusia menyatakan bahwa berdasarkan prinsip keamanan yang *equal and indivisible* negara memiliki kewajiban untuk tidak memperkuat keamanan sendiri dengan mengorbankan keamanan negara lain.¹⁹

Bergabungnya Ukraina ke dalam NATO bukan hanya akan mendapatkan perlindungan militer, tetapi juga pasal 5 NATO'S Founding Treaty yang akan berlaku kepada Ukraina, mengenai prinsip pertahanan kolektif. Pasal 5 menyatakan bahwa jika Sekutu NATO menjadi korban serangan bersenjata, setiap anggota Aliansi akan menganggap tindakan kekerasan ini sebagai serangan bersenjata terhadap semua anggota dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu Sekutu yang diserang. Dalam pasal ini, prinsip pertahanan kolektif merupakan inti dari perjanjian pendirian NATO. Prinsip ini tetap menjadi prinsip yang unik dan abadi yang mengikat para anggotanya bersama, mengikat mereka untuk saling melindungi dan menetapkan semangat solidaritas dalam Aliansi.²⁰

Klaim hak pembelaan diri oleh Rusia terkait adanya berbagai ancaman telah memicu tanggapan dari Ukraina sebagai pihak dalam konflik. Presiden Zelensky menyatakan bahwa Ukraina fokus untuk memperkuat posisi dan kekuatan Ukraina

¹⁷ James A. Green, Christian Henderson dan Tom Ruys, 2022, "Russia's Attack on Ukraine and the Jus Ad Bellum," *Journal on the Use of Force and International Law*, Vol. 9, No. 1, hlm. 17.

¹⁸ Jonathan Masters, "Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia," [Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia | Council on Foreign Relations](#), Dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024 Jam 16.10.

¹⁹ Jonathan Guyer, "How America's NATO Expansion Obsession Plays into the Ukraine Crisis," <https://www.vox.com/22900113/nato-ukraine-russia-crisis-clinton-expansion>, dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2024 Jam 16.00.

²⁰ Reuters, "What would happen If Ukraine Joined NATO?" Europe, <https://www.reuters.com/world/europe/what-would-happen-if-ukraine-joined-nato-2023-07-05/>, Dikunjungi pada tanggal 7 November 2024 Jam 13.07 WIB.

dalam konflik. Presiden Zelensky juga menuntut agar Rusia segera menghentikan perang, menarik semua pasukan dan perlengkapannya dari Ukraina, serta menghormati integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina. Presiden Zelensky secara konsisten menyerukan resolusi damai untuk konflik di Ukraina dan menekankan perlunya diplomasi dan negosiasi untuk mengakhiri perang. Meskipun begitu, dapat ditemukan beberapa respons dari Ukraina yang secara tersirat membantah klaim dari Rusia.

Klaim terkait potensi keanggotaan Ukraina di NATO tidak ditanggapi secara langsung oleh Ukraina. Namun, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2008 Ukraina telah menunjukkan tekad untuk bergabung dengan NATO dengan mengajukan *Membership Action Plan* kepada NATO.²¹ Setelah Rusia mengumumkan operasi militer khusus sebagai tanda dimulainya Agresi Rusia, Presiden Zelensky menyatakan bahwa Ukraina tidak bisa memperkirakan bahwa negaranya akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat karena kurangnya konsensus dari negara-negara anggota NATO. Kemudian, pada 30 September 2022 Ukraina secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NATO.²² Akan tetapi, pada Juni 2023 Presiden Zelensky kembali menyatakan bahwa Ukraina telah melepaskan harapan agar negaranya bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Setelah berbulan-bulan mendesak agar anggota NATO mengakui Ukraina, Presiden Zelensky mengakui bahwa hal tersebut mustahil terjadi sebelum perang dengan Rusia berakhir.²³

Dua tahun setelah invasi Federasi Rusia ke Ukraina, penderitaan warga sipil semakin meningkat sebagai akibat dari pengabaian Rusia terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan kewajiban HAM nya. Mengutip dari sumber Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mendokumentasikan 11 kasus pengadilan pidana terhadap tawanan perang Ukraina karena hanya berpartisipasi dalam pertempuran. Penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, kerja paksa yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoner of War*).²⁴ Perlakuan terhadap tawanan perang yang terjadi di kamp tawanan perang sudah melanggar ketentuan Bab II Pasal 13, 14, dan 15 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang (*General Protection of Prisoner of War*).

²¹ Interfax, "Ukraine applied to join NATO in 2008, application not withdrawn, final decision on country's entry should now be made by NATO members—Stefanishyna," <https://en.interfax.com.ua/news/general/833852.html>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024 Jam 08.22.

²² Reuters, Tom Balmforth, "Ukraine applies for NATO membership, rules out Putin talks," <https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-ukraine-applying-nato-membership-2022-09-30/>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024 Jam 08. 40.

²³ NPR, Scott Simon, "Zelenskyy accepts Ukraine cannot become a NATO member until the war ends," <https://www.npr.org/2023/06/03/1179979756/zelenskyy-accepts-ukraine-cannot-become-a-nato-member-until-the-war-ends>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024 Jam 09.00.

²⁴ United Nations Human Rights Office of High Commissioner, "UN Commission of Inquiry: Statement on 1000 days of Russia's full-scale invasion of Ukraine", <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/11/un-commission-inquiry-statement-1000-days-russias-full-scale>, dikunjungi pada tanggal 29 November 2024 Jam 10.01.

Berikut penjelasan Pasal 13, 14, dan 15 Konvensi Jenewa tahun 1949:

Article 13

“Tawanan perang harus selalu diperlakukan secara manusiawi. Setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum oleh Penguasa Penahanan yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan seorang tawanan perang yang berada dalam penahanannya adalah dilarang, dan akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi ini. Secara khusus, tawanan perang tidak boleh dijadikan sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah dalam bentuk apa pun yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, perawatan gigi, atau perawatan rumah sakit bagi tawanan yang bersangkutan dan yang dilakukan demi kepentingannya. Demikian pula, tawanan perang harus setiap saat dilindungi, khususnya terhadap tindakan kekerasan atau intimidasi dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.”

Article 14

“Tawanan perang berhak dalam segala situasi untuk dihormati pribadi dan kehormatannya.

Perempuan harus diperlakukan dengan segala hormat karena jenis kelaminnya dan dalam segala hal harus mendapat manfaat dari perlakuan yang sama baiknya dengan perlakuan yang diberikan kepada laki-laki.

Tawanan perang harus tetap memiliki kapasitas sipil penuh yang mereka nikmati pada saat penangkapan mereka. Pihak yang menahan tidak boleh membatasi pelaksanaan, baik di dalam maupun di luar wilayahnya, hak-hak yang diberikan oleh kapasitas tersebut, kecuali sejauh penahanan tersebut mengharuskan.”

Article 15

“Pihak yang menahan tawanan perang wajib menyediakan secara cuma-cuma biaya pemeliharaan dan perawatan medis yang diperlukan oleh kondisi kesehatan mereka.”

Kemudian dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina, dan adanya penyerangan terhadap objek sipil. OHCHR juga mendokumentasikan penggunaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang secara teratur dibentuk, independen dan tidak memihak; dan pelanggaran hak untuk memiliki penasihat hukum pilihan sendiri. Termasuk penggunaan senjata peledak tanpa pandang bulu dengan efek yang luas, penargetan sasaran-sasaran sipil, beberapa di antaranya berstatus dilindungi, gelombang serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina seperti serangan Moskow yang semakin intensif terhadap kapal-kapal sipil dan infrastruktur pelabuhan; penghancuran pembangkit listrik yang disengaja; dan pendudukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, serta pemindahan paksa dan deportasi anak-anak.²⁵

²⁵ UN Meetings Coverage and Press Releases, “Russian Federation’s Attacks on Ukraine Causing Uptick in Civilian Deaths, Damage to Infrastructure, Black Sea Ports, Senior Official Tells Security

Pada 25 November 2022 terjadi pemindahan paksa dan deportasi manusia secara melawan hukum dan orang-orang yang dipaksa ini rata-rata berusia di bawah 18 tahun. Pada Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Komisaris Presiden untuk Hak Anak, Maria Lvova-Belova Putin pada 16 Februari 2023 menyatakan bahwasannya deportasi anak-anak tersebut sebagai program kemanusiaan dengan alasan pemindahan anak-anak Ukraina ke Rusia merupakan praktik adopsi anak-anak korban perang yang dilakukan keluarga-keluarga Rusia. Dan menambahkan bahwa anak-anak yang dipindahkan adalah bagian dari wilayah Rusia dan bukan warga negara Ukraina. Namun, pernyataan tersebut salah berdasarkan bantahan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), anak-anak dari sejumlah wilayah di Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia adalah warga negara Ukraina. Rusia telah melakukan deportasi paksa terhadap anak-anak tersebut ke Rusia dan mengatur sedemikian rupa agar mereka dapat diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia²⁶. Kemudian laporan serangan terhadap warga Chernihiv, Ukraina saat mengantre roti pada tanggal 16 Maret. Sedikitnya ada 14 korban meninggal akibat tembakan artileri Rusia yang berasal di timur laut Chernihiv. Posisi artileri Rusia dengan warga setidaknya berjarak sekitar 14 km. konsisten dengan serangan yang diluncurkan oleh militer Rusia yang beroperasi beberapa kilometer di utara Chernihiv, menurut tim pemetaan di *Institute for the Study of War (ISW)*.²⁷

Oleh karena itu, Rusia juga dikatakan telah melakukan pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi Jenewa IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil ketika perang (*Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) khususnya pada bagian 2 tentang Perlindungan umum bagi penduduk terhadap konsekuensi tertentu dari perang (*General protection of populations against certain consequences of war*) pasal 13 mengenai *Field of application of part II*:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bagian II ini mencakup seluruh penduduk negara-negara yang sedang berkonflik, tanpa pembedaan yang merugikan, khususnya berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh perang.”

Kemudian Pasal 16 mengenai *Wounded and sick I. General protection*:

“Orang-orang yang terluka dan sakit, serta orang-orang yang lemah, dan ibu-ibu yang sedang mengandung, harus menjadi objek perlindungan dan penghormatan khusus.”

Serangan itu secara langsung merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977:

Council”, <https://press.un.org/en/2024/sc15857.doc.htm>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2024 Jam 14.19.

²⁶ VOA Indonesia, 2023, "Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina sebagai Program Kemanusiaan" <https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 19.11.

²⁷ BBC News Europe, 2022, *Chernihiv: Are these Russia's weapons of war?* <https://www.bbc.com/news/world-europe-61036880>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025 jam 14.21

“Serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek-objek sipil, atau kombinasinya, yang akan berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diantisipasi.”

Mengenai perlindungan Objek sipil terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, menyatakan:

“Objek-Objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan, Objek-Objek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)”.

Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer, bahwa:

“sasaran-sasaran militer dibatasi pada Objek-Objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.”

Objek-objek sipil yang di jelaskan diatas seperti rumah-rumah warga, tempat-tempat bersejarah, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan penduduk sipil lainnya. Badan kebudayaan PBB, UNESCO, mengatakan bahwa setidaknya 274 situs budaya yang penting telah rusak sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Situs-situs yang rusak itu termasuk 117 situs keagamaan, 98 bangunan bersejarah, 27 museum, dan 19 monumen, dan 12 perpustakaan kata Wakil Direktur Jenderal UNESCO untuk Kebudayaan, Ernesto Ottone Ramirez di Paris pada tanggal 1 April 2022.²⁸ Infrastruktur atau objek sipil yang rusak beberapa diantaranya, monumen-monumen yang rusak di Oblast Donetsk adalah Teater Drama di Mariupol, Gereja Santo George di desa Dolyzna, Katedral Ortodoks Bunda Maria dari Kazan di Marinka, Museum Pengetahuan Lokal Mariupol, Rumah Budaya Artem di Lyman, Masjid Al-Qadar di Bakhmut. Kemudian, perumahan di Kota Mariupol, Ukraina, yang merupakan kota pelabuhan utama diserang oleh artileri Rusia pada 10 Maret 2022. Pada 13 Maret 2022 wali kota Mariupol, Vadym Boichenko, mengatakan jumlah korban sipil telah meningkat di atas 2.100 jiwa sejak serangan di Mariupol. Hingga April 2022 jumlah korban meningkat lebih dari 5.000 warga sipil, termasuk 210 anak, telah menjadi korban pemboman dan pertempuran di jalanan.²⁹ Masih di kota yang sama, pasukan Rusia membom rumah sakit anak dan bersalin, di mana 50 orang tewas terbakar dan tertimpa reruntuhan. Pada 14 Maret 2022, Rusia menargetkan sarana pompa dan pasokan air di Chernihiv. Ledakan rudal di Kyiv tengah pada 10 Oktober 2022 menabrak infrastruktur di seluruh Ukraina dan menghancurkan fasilitas listrik dan air. Dua ledakan mengguncang fasilitas energi di kota tenggara Dnipro, sebuah kota berpenduduk hampir 1 juta jiwa, menyebabkan

²⁸ Radio Free Europe: Radio Liberty, "UNESCO Says At Least 53 Cultural Sites In Ukraine Damaged In War" <https://www.rferl.org/a/ukraine-unesco-endangered-sites-russia/31782483.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 14.37.

²⁹ BBC News Indonesia, "Serangan Rusia ke Ukraina: Kota-kota yang hancur kini menggali kuburan massal", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60746097>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 13.42.

kerusakan serius.³⁰ *Palace of Culture for the Railway Workers* atau *Palats Zaliznychnykv* monumen bersejarah Ukraina yang dibangun pada tahun 1932 hancur oleh pasukan Rusia pada 18 Agustus 2022.³¹

Rusia dianggap dan dipandang melakukan kejahatan perang juga kejahatan Agresi. Melalui berbagai pelanggaran terhadap pasal-pasal di Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan Kejahatan perang Pasal 8 dan kejahatan agresi Pasal 8 *bis* setelah diamandemen melalui Konferensi Kampala tahun 2010, bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental di Hukum Humaniter Internasional termasuk juga moralitas internasional. Berdasarkan Pasal 8 (1) statuta, Pengadilan memiliki yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan perang khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari kejahatan berskala besar. Kemudian, Pasal 8 ayat (2) huruf a menjelaskan kejahatan perang berarti pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Salah satu unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma ini adalah melakukan deportasi dan transfer manusia secara melawan hukum dan orang-orang yang dipaksa ini berusia di bawah 18 tahun. Penerapan hukum yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 terhadap Putin yang dinilai menerjang hukum adalah mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku kepada siapa saja, karena ini menyangkut prinsip kemanusiaan. Pihak yang melakukan pelanggaran dalam wilayah kemanusiaan berlaku prinsip universal.

Resolusi Majelis Umum PBB 2131 Tahun 1965 Tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* juga menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dalam urusan domestik negara lain adalah tidak dapat diterima. Tindakan Rusia untuk melakukan Agresi ke Ukraina, baik secara militer maupun politik, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam resolusi tersebut salah satunya prinsip non-intervensi.

Dapat ditegaskan bahwasannya Rusia mencoba untuk menjustifikasi operasi militer khusus-nya sebagai awal mula terjadi agresi melalui klaim *Self-Defense* di bawah ketentuan Pasal 51 Piagam PBB. Klaim ini didasarkan pada adanya permintaan bantuan militer dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk untuk melawan agresi Ukraina. Selain itu, operasi militer khusus juga dilakukan sebagai respons terhadap adanya pembatasan hak *self-determination* oleh Ukraina terhadap orang-orang di Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Selanjutnya, salah satu inti dari klaim hak pembelaan diri oleh Rusia menurut ketentuan Pasal 51 Piagam PBB, dilakukan terhadap adanya ancaman yang saling terkait baik oleh NATO maupun Ukraina. Rusia mengklaim bahwa NATO telah memperluas infrastruktur militernya ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Rusia dan kontrol NATO terhadap Ukraina yang dianggapnya sebagai ancaman. Selain itu, potensi bergabungnya Ukraina ke dalam NATO menjadi ancaman nyata bagi Rusia, karena infrastruktur militer NATO akan meningkat di wilayah Ukraina, yang berbatasan

³⁰ BBC News Indonesia, "Perang Ukraina-Rusia: Apa saja yang disaksikan Putin saat mengunjungi Mariupol, kota yang 'hancur digempur Rusia' di awal perang" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65010991>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 14.27.

³¹ *Ibid*

langsung dengan Rusia. Selain dugaan ancaman yang ditimbulkan oleh NATO, Rusia juga mengidentifikasi ancaman langsung dari Ukraina terhadap Rusia sebagai entitas teritorial.

Implikasi Agresi Yang Dilakukan Rusia Terhadap Status Keanggotaannya di Dewan HAM PBB

1. Prosedur di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Negara Anggota Yang Melakukan Pelanggaran HAM

Dewan HAM PBB merupakan badan subsider dari Majelis Umum PBB yang menggantikan Komisi HAM PBB dan dibentuk berdasarkan konstitusi dan amanat langsung dari Piagam PBB. PBB memiliki peran penting dalam meminta kerjasama negara-negara dan terciptanya keadaan yang stabil dengan maksud sebagaimana tercantum dalam tujuan pendiriannya. Mengingat bidang yang ditangani sangat luas, maka perlu adanya pembagian pekerjaan dengan pembentukan suatu badan-badan khusus dibawah PBB sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 57 Piagam PBB. Pasal 7 ayat (2) Piagam PBB menyatakan, *"Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter"*.

Pasal 57 Ayat (1) Piagam PBB menyatakan:

"Berbagai badan-badan khusus, yang didirikan atas persetujuan antar-pemerintah dan mengemban tanggung jawab internasional yang luas, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan dasarnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, kesehatan, maupun di bidang yang berkaitan dalam suatu hubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 63."

Dewan ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan Resolusi MU-PBB 60/251, di paragraf 2 dan 3 Dewan ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menangani situasi pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelanggaran berat dan sistematis, membuat rekomendasi mengenai hal tersebut, pemantauan dan investigasi terhadap pelanggaran HAM, Mendorong akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM, dan melakukan advokasi dan dukungan untuk korban. Selain itu, Dewan HAM PBB memiliki 3 (tiga) peranan penting lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kemanusiaan, yaitu inisiator, fasilitator, dan mediator. Sebagai inisiator artinya Dewan HAM PBB dapat memulai langkah-langkah penyelesaian masalah, dengan mendorong penegakan hukum terhadap negara anggota. Sedangkan sebagai fasilitator artinya Dewan HAM PBB menjadi wadah untuk memfasilitasi aktor-aktor negara maupun non-negara untuk melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, peran mediator yaitu sebagai perantara dalam penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM.

Dalam kasus Rusia, Dewan HAM PBB telah menjalankan fungsinya sebagai wadah negara-negara untuk mendorong penegakan hukum dengan upaya himbauan terhadap negara-negara anggota yang terdeteksi melakukan pelanggaran HAM. Peran Dewan HAM dalam pemantauan dan investigasi terhadap pelanggaran HAM, dapat dilihat dari data dan sejumlah bukti yang didapatkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) melalui Kepala jaksa ICC yang

melakukan investigasi terhadap kejahatan agresi di Ukraina atas permintaan dari 39 negara pada Maret 2022 lalu,³² dan Investigator PBB melalui Komisi Penyelidikan PBB atau *The Independent International Commission of Inquiry (COI)* telah menemukan semakin banyak bukti kejahatan agresi Rusia di Ukraina, pada Juni 2023 lalu.³³

Dewan HAM PBB telah melakukan upaya untuk memberikan dukungan kepada korban agresi Rusia di Ukraina. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* secara aktif memverifikasi laporan tentang pelanggaran HAM, termasuk laporan kematian warga sipil dan cedera akibat konflik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat mengenai dampak agresi Rusia terhadap jumlah korban terutama penduduk sipil. laporan berkala yang mengungkapkan kondisi di lapangan, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi. Laporan ini tidak hanya mendokumentasikan pelanggaran tetapi juga berfungsi sebagai alat advokasi untuk mendesak tindakan internasional.³⁴

Kemudian, Dewan HAM telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rusia selama agresinya di Ukraina. Dalam hal ini Rusia yang telah melakukan pelanggaran HAM akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan hak-hak keanggotaannya. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Resolusi MU-PBB 60/251 2006, pada Paragraf 8:

“Memutuskan bahwa keanggotaan Dewan harus terbuka untuk semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa; ketika memilih anggota Dewan, Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan kontribusi para kandidat terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta janji dan komitmen sukarela yang mereka buat untuk itu; Majelis Umum, dengan dua pertiga mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara, dapat menanggukhan hak-hak keanggotaan di Dewan dari anggota Dewan yang melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia.”

Paragraf tersebut pada intinya menegaskan, Majelis Umum, dengan 2/3 (dua pertiga) mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara, dapat menanggukhan hak-hak keanggotaan Rusia di Dewan karena melakukan pelanggaran HAM yang berat dan sistematis. Hak-hak tersebut mencakup semua hak Rusia sebagai negara anggota di Dewan HAM PBB, dan merujuk pada wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengadili kasus atau isu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional seperti agresi yang terjadi di wilayah Ukraina. Penangguhan hak-hak tersebut diantaranya:³⁵

1. Hak Rusia untuk berpartisipasi dalam sidang-sidang Dewan HAM PBB dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu HAM global.

³² BBC News Indonesia, “Rusia-Ukraina: Tindakan apa saja yang termasuk kejahatan perang?,” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60613803>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024 Jam 20.20.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hak-hak tersebut dijabarkan berdasarkan Resolusi MU-PBB 60/251 tentang *Human Rights Council* 2006

2. Hak Rusia untuk mengajukan resolusi dan rekomendasi terkait situasi HAM di berbagai negara atau isu-isu HAM tematik.
3. Hak Rusia untuk berpartisipasi dalam mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) untuk meninjau situasi HAM di negara-negara anggota PBB.
4. Hak Rusia untuk terlibat dalam dialog interaktif dengan prosedur-prosedur khusus Dewan HAM seperti pelapor khusus dan kelompok kerja.
5. Hak Rusia untuk memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan di Dewan HAM seperti Presiden dan anggota Biro.
6. Tanggung jawab Rusia untuk mempromosikan dan melindungi HAM baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
7. Tanggung jawab Rusia untuk bekerja sama dengan mekanisme-mekanisme HAM PBB dan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.
8. Hak Rusia untuk mengangkat isu-isu HAM yang menjadi perhatian khusus negara tersebut dalam forum Dewan HAM.
9. Hak Rusia untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan perumusan standar-standar HAM internasional baru.
10. Tanggung jawab Rusia untuk melaporkan kemajuan implementasi HAM di negaranya secara berkala kepada Dewan HAM.

Rusia sebagai negara anggota yang melakukan pelanggaran HAM, maka harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan pada AD-ART Dewan HAM PBB itu sendiri yaitu dengan menanggukhan hak-hak keanggotaannya. Prosedur penanggukan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB jika merujuk resolusi A/ES-11/L.4, meliputi beberapa tahap penting:³⁶

1. Pengajuan resolusi: Negara anggota atau kelompok negara mengajukan resolusi untuk menanggukhan keanggotaan suatu negara dari Dewan HAM PBB.
2. Pemungutan suara di Majelis Umum PBB: Resolusi tersebut harus disetujui melalui pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
3. Perolehan suara mayoritas: Untuk disahkan, resolusi penanggukan membutuhkan dukungan dari dua pertiga mayoritas anggota Majelis Umum PBB yang hadir dan memberikan suara.
4. Alasan atau Dasar Penanggukan: Penanggukan dapat dilakukan jika suatu negara anggota terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat dan sistematis selama masa keanggotaannya.
5. Konsekuensi penanggukan: Jika resolusi disahkan, negara tersebut akan kehilangan hak dan keistimewaan keanggotaannya di Dewan HAM PBB.

Kemudian reintergrasi keanggotaan Rusia setelah penanggukan harus melewati proses formal yang melibatkan revisi keputusan penanggukan sebelumnya. Hal ini biasanya melibatkan diskusi dan kesepakatan baru di antara negara-negara anggota PBB. Sesuai didalam ketentuan AD-ART Dewan HAM PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251, pada paragraf 12 menjelaskan:

³⁶ UN General Assembly Resolution of 2022 A/ES-11/L.4 *Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*

“berorientasi pada hasil, memungkinkan adanya diskusi tindak lanjut terhadap rekomendasi dan implementasinya, serta memungkinkan adanya interaksi substantif dengan prosedur dan mekanisme khusus.”

2. Resolusi Majelis Umum PBB Atas Agresi Rusia di Ukraina Sebagai Putusan Terhadap Status Keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mulai mengeluarkan resolusi setelah pembentukannya pada tahun 2006, sebagai pengganti Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Berdasarkan Resolusi Dewan HAM PBB dengan kode A/HRC/RES 5/1 berjudul *Institution-building of the United Nations Human Rights Council* yang digunakan untuk mengatur dan memperkuat mekanisme serta prosedur yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, menyatakan proses pengeluan resolusi dimulai dengan adopsi Resolusi 60/251 oleh Majelis Umum PBB pada 15 Maret 2006, yang menetapkan mandat dan struktur Dewan HAM. Sesi reguler ke-53 pada 19 Juni sampai 14 Juli 2003 Dewan Hak Asasi Manusia yang berjudul *Resolutions, decisions and President's statements*, turut menjelaskan bahwa pembagian kode atau nama suatu dokumen yang dikeluarkan Dewan HAM PBB diawali dengan A/HRC/RES untuk resolusi, A/HRC/DEC untuk keputusan, atau A/HRC/PRST untuk pernyataan Presiden. Yang dapat dikatakan bahwa Dewan HAM PBB tidak hanya mengeluarkan suatu keputusan namun juga dapat mengadopsi suatu Resolusi selayaknya Majelis Umum.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memilih untuk menanggukkan Rusia dari badan HAM terkemuka yakni Dewan HAM PBB Pada 7 April 2022 lalu, hanya beberapa hari setelah materi fotografi dan video dari pembantaian di kota bucha muncul dengan total 300 mayat ditemukan bergelimpangan, beberapa puluh kilometer dari Kyiv. Dan Ditengah tuduhan bahwa tentaranya membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah sekitar ibu kota Ukraina, Kyiv. Majelis Umum PBB menanggukkan Rusia dari Dewan HAM PBB melalui sebuah resolusi yang berjudul “*Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*” dengan kode (A/ES-11/L.4) tahun 2022, hampir dua bulan setelah Rusia melancarkan kekuatan militernya di Ukraina dan dua tahun setelah terpilihnya Rusia menjadi anggota Dewan HAM PBB pada Oktober 2020.³⁷

Resolusi yang diprakasai Amerika Serikat tersebut mencapai dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara Majelis Umum yang diperlukan untuk disahkan, dengan 93 suara mendukung, 24 menentang dan 58 delapan negara abstain. Resolusi singkat tersebut menyerukan “*grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine*” atau menyatakan “keprihatinan besar atas krisis HAM dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina”, khususnya atas laporan pelanggaran HAM berat dan sistematis. Pemungutan suara tersebut yang

³⁷ AL JAZEERA, “UN suspends Russia from human rights body: How your country voted,” <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/8/russia-suspended-from-un-human-rights-body-how-countries-voted>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2024 Jam 15.15 WIB.

menjadikan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang keanggotannya dicabut dari badan PBB mana pun.

Setelah adopsi resolusi dan penangguhan hak keanggotaan Rusia di Dewan, dalam sidang khusus ke-11: krisis humaniter di Ukraina, perwakilan Federasi Rusia mengatakan bahwa negaranya telah memutuskan untuk keluar sebelum akhir masa jabatannya. Keputusan tersebut dilakukan karena menurut perwakilan Rusia untuk PBB, Majelis Umum PBB sarat akan politik dan telah di dominasi oleh satu kelompok negara untuk kepentingannya sendiri. Rusia menggaris bawahi bahwa negaranya tidak bisa untuk tetap menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan negara untuk memeras orang lain demi tujuan mereka sendiri, terutama karena negara yang sama telah secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia selama bertahun-tahun, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk Amerika Serikat. Perwakilan Federasi Rusia mengatakan draf resolusi yang sedang dipertimbangkan tidak ada hubungannya dengan situasi HAM yang sebenarnya di lapangan, menambahkan bahwa itu adalah upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi dominannya dan upaya kolonialisme HAM dalam hubungan internasional. Federasi Rusia sepanjang keanggotaannya di Dewan HAM secara konsisten mempertahankan prinsip kerja sama berdasarkan saling menghormati dan status yang setara.³⁸

Majelis Umum PBB dapat menangguhkan hak dan keistimewaan anggota Dewan mana pun yang diputuskan telah terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis selama masa keanggotaannya, sesuai dalam ketentuan Paragraf 8 Resolusi MU-PBB 60/251. Proses penangguhan membutuhkan dua pertiga suara mayoritas oleh Majelis Umum. Resolusi yang membentuk Dewan HAM menyatakan bahwa ketika memilih anggota Dewan, Negara-negara anggota harus mempertimbangkan kontribusi para calon terhadap pemajuan dan perlindungan HAM serta janji dan komitmen sukarela yang dibuat, dan bahwa anggota yang dipilih untuk Dewan akan menjunjung tinggi standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Berdasarkan teks resolusi yang berjudul "*Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*" dengan kode (A/ES-11/L.4) tahun 2022 tersebut, Majelis memutuskan untuk menangguhkan hak keanggotaan Rusia di Dewan HAM dan meninjau masalah tersebut sebagaimana mestinya.³⁹

Dampak dari Agresi Rusia di Ukraina juga melahirkan resolusi lain yaitu Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2022 dengan kode (A/RES/ES-11/1) dan subjeknya *Aggression against Ukraine*.⁴⁰ Resolusi itu menyesalkan Agresi Rusia di Ukraina dan menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dan pembalikan keputusannya untuk mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri.

³⁸ United Nations, "General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from Human Rights Council, Continuing Emergency Special Session on Humanitarian Crisis in Ukraine", Eleventh Emergency Special Session, <https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2024 Jam 16.04 WIB.

³⁹ United Nations, "General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from Human Rights Council" <https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>, dikunjungi pada 8 November 2024 Jam 14.58 WIB.

⁴⁰ Resolusi MU-PBB A/RES/ES-11/1 2022 *Aggression against Ukraine*.

Resolusi tersebut disponsori oleh 96 negara, dan disahkan dengan 141 suara mendukung, 5 menentang, dan 35 abstain, dengan hasil dan statusnya bahwa resolusi tersebut diadopsi.⁴¹ Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 menyatakan keprihatinan tentang dampak potensial konflik terhadap peningkatan kerawanan pangan secara global, karena Ukraina dan kawasan ini adalah salah satu wilayah terpenting dunia untuk ekspor biji-bijian dan pertanian, ketika jutaan orang menghadapi kelaparan atau risiko langsung kelaparan yang sedang mengalami kerawanan pangan yang parah di beberapa wilayah di dunia, serta pada ketahanan energi. Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 juga menyebut agar Federasi Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar hukum lebih lanjut terhadap negara anggota mana pun. Menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Lalu mendesak penyelesaian damai segera atas konflik antara Federasi Rusia dan Ukraina melalui dialog politik, negosiasi, mediasi dan cara damai lainnya.⁴²

Resolusi Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan sifatnya hanya rekomendasi, namun mengandung kewajiban moral bagi para anggota untuk mentaatinya, bahkan ada yang memiliki daya mengikat cukup efektif. Contohnya yang paling terkenal adalah Resolusi MU PBB mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁴³ Resolusi MU PBB mengikat secara hukum jika berkaitan dengan aturan administratif dan anggaran belanja.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 17 Piagam PBB, Majelis Umum dapat mengambil keputusan tentang masalah anggaran dan keuangan yang mengikat para anggotanya (*The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization*). Jadi dapat dikatakan, resolusi MU PBB yang berkomitmen untuk mengambil suatu 'tindakan' dapat mengikat negara-negara anggota.⁴⁵

Oleh sebab itu negara tidak berkewajiban untuk mengimplementasikannya yang berarti Rusia bisa saja tidak mengikuti keputusan yang diberikan oleh Majelis Umum. Penangguhan umumnya tidak permanen dalam artian Majelis bisa saja membatalkan keputusannya terhadap Rusia, karena negara yang ditangguhkan akan tetap menjadi anggota dan terus terikat oleh kewajiban berdasarkan piagam PBB dengan catatan tetap ada batasan terhadap kewajiban tersebut. Namun setelah penangguhan keanggotaannya di Dewan, Rusia secara sepihak menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB, yang berarti Majelis Umum tetap melanjutkan keputusannya

⁴¹ Deutsche Welle, "Ukraine: ICC to investigate suspected war crimes — as it happened". <https://www.dw.com/en/ukraineicc-to-investigate-suspected-warcrimes-as-it-happened/a-60977270>, diakses pada tanggal 8 November 2024 Jam 20.37 WIB.

⁴² Resolusi MU-PBB A/RES/ES-11/1 2022 *Aggression against Ukraine*.

⁴³ Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional: Sumber-sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 247-252.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 249.

⁴⁵ Christopher C. Joyner, 1981, "U.N. General Assembly Resolutions and International Law: Rethinking the Contemporary Dynamics of Norm-Creation", *California Western Law Review*, Vol. 11, No. 4, hlm. 445, 458.

yaitu menanggukkan Rusia dari semua hak-haknya sebagai negara anggota Dewan HAM PBB melalui pemungutan suara sebanyak 2/3 anggota yang telah dilalukan.⁴⁶

Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh Majelis Umum dalam penanggukan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB sebagai akibat tindakan Rusia selama melancarkan serangan militernya ke Ukraina, harus dipatuhinya, bahkan jika bertentangan dengan kebijakan domestik Rusia melihat dari penderitaan warga sipil dan sejumlah kerugian lainnya yang meningkat atas agresi yang dilakukan. Dengan memutuskan untuk bergabung dengan organisasi internasional, maka Rusia memberikan persetujuan (*consent*) untuk terikat pada aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Dewan HAM PBB. Ada batasan tertentu yang harus diikuti Rusia sesuai dengan komitmen internasionalnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bersifat absolut ketika berhadapan dengan kewajiban internasional yaitu penegakan HAM. Dengan menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB setelah keanggotannya ditanggukkan, membuat Rusia telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM, sehingga penanggukan Rusia sebagai anggota Dewan HAM PBB telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam aturan pembentukan Dewan itu sendiri yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006, bahwa bagi negara pelanggar HAM berat secara sistematis akan dikenakan sanksi berupa penanggukan termasuk hak-haknya sebagai anggota.

CONCLUSION

Agresi Rusia terhadap Ukraina berdasarkan hukum internasional telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional diantaranya, Piagam PBB di Pasal 62 ayat (2) yaitu Rusia yang melanggar peningkatan penghormatan dan penghargaan atas HAM, melanggar Pasal 5 dan Pasal 8 *bis* Statuta Roma 1998 berkaitan dengan agresi Rusia yang menyerang kedaulatan keutuhan wilayah Ukraina, melanggar Konvensi Geneva III 1949 khususnya Bab II Pasal 13, 14, 15 yaitu perlakuan tentara Rusia terhadap tawanan perang Ukraina, Konvensi Geneva IV penyerangan terhadap penduduk sipil ketika perang, dan melanggar beberapa Resolusi Majelis Umum PBB. Implikasi Agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menyebabkan status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB ditanggukkan berdasarkan ketentuan pembentukan Dewan HAM PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006 khususnya pada paragraf 8 mengatur tentang Mekanisme pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Proses penanggukan dimulai dari pengajuan Resolusi penanggukan hingga pemungutan suara terhadap Resolusi tersebut.

BIBLIOGRAPHY

- Sumaryo Suryokusumo, "Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Hukum Internasional, 2005, Vol. 3, No. 1
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020, hlm 51.

⁴⁶ Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 tentang Human Right

- Alexander Orakhelashvili, "Changing Jus Cogens through State Practice? – the Case of the Prohibition of the Use of Force and its Exceptions," dalam Marc Weller, Ed., *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford University Press, 2016, hlm. 72 & 860.
- Ben Saul and Dapo Akande, *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2020, hlm. 134.
- Iona Hiroshi Yuki Rombot, "Konsep Pre-emptive War Sebagai Anticipatory Self-Defense Ditinjau Dari Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2013, hlm. 4.
- Hidayatika Gilang Pamungkas, "Self-defense Dalam Teori dan Praktik", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016, hlm.1
- Tom Dannenbaum, *The Crime of Aggression, Humanity, and the Soldier*, Liebhlich, Cambridge University Press, 2018.
- KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2007, hlm. 57-60.
- D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London : Sweet & Maxwell, 2004, Hlm. 889.
- Yusman Sumantri, *Kajian yuridis pasal 51 United Nations Charter tentang Self defence dalam kaitannya dengan kedaulatan suatu negara*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2010, hlm, 235.
- Adrias Svezak, "The American Pre-Emptive Strike Doctrine and International Law," 2007, hlm .65.
- United Nations, Security Council, "Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General," New York: UN Headquarters.
- Sofia Cavandoli dan Gary A. Wilson, "Distorting Fundamental Norms of International Law to Resurrect the Soviet Union: The International Law Context of Russia's Invasion of Ukraine," *Netherland International Review*, 2022, hlm. 387
- James A. Green, Christian Henderson dan Tom Ruys, "Russia's Attack on Ukraine and the Jus Ad Bellum," *Journal on the Use of Force and International Law*, 2022, Vol. 9 No. 1, hlm. 6.
- James A. Green, Christian Henderson dan Tom Ruys, "Russia's Attack on Ukraine and the Jus Ad Bellum," *Journal on the Use of Force and International Law*, 2022, Vol. 9, No. 1, hlm. 17.
- Woehrel, S, "Ukraine: Current Issue and U.S. Policy", Congressional Research Service, 2014, hlm. 1-18.
- Interfax, "Ukraine applied to join NATO in 2008, application not withdrawn, final decision on country's entry should now be made by NATO members–Stefanishyna," <https://en.interfax.com.ua/news/general/833852.html>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024.
- Reuters, Tom Balmforth, "Ukraine applies for NATO membership, rules out Putin talks," <https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-ukraine-applying-nato-membership-2022-09-30/>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024.

NPR, Scott Simon, "Zelenskyy accepts Ukraine cannot become a NATO member until the war ends," <https://www.npr.org/2023/06/03/1179979756/zelenskyy-accepts-ukraine-cannot-become-a-nato-member-until-the-war-ends>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024.

Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional: Sumber-sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 247-252.

Christopher C. Joyner, 1981, "U.N. General Assembly Resolutions and International Law: Rethinking the Contemporary Dynamics of Norm-Creation", *California Western Law Review*, Vol. 11, No. 4, hlm. 445, 458.

UN General Assembly Resolution of 2022 A/ES-11/L.4 *Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*

Resolusi MU-PBB A/RES/ES-11/1 2022 *Aggression against Ukraine*.

Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 tentang Human Right

WEBSITE

President of Russia, "Message from the President of the Russian Federation," <http://kremlin.ru/events/president/news/67843>, dikunjungi pada tanggal 14 September 2024.

Reuters, "U.S. dismisses Russian claims of biowarfare labs in Ukraine", www.reuters.com/world/russia-demands-us-explain-biological-programme-ukraine-2022-03-09, dikunjungi pada tanggal 1 September 2024.

Lieber Institute, "Understanding Self-Defense and The Law of Armed Conflict," <https://lieber.westpoint.edu/understanding-self-defense-law-armed-conflict/>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025.

Alec Luhn, "Pro-Russian rebels vow to take control of infrastructure across Donetsk region," <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/14/ukraine-deadline-pro-russian-rebels-passes>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2024.

NATO, "Brussels Summit Communiqué," https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025.

Sky News, "Russia launches invasion of Ukraine-Putin's troops 'seize control' of Chernobyl nuclear disaster site," <https://news.sky.com/story/russia-launches-invasion-of-ukraine-forces-trying-to-seize-site-of-chernobyl-nuclear-disaster-12550026#>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025.

Jonathan Masters, "Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia," [Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia | Council on Foreign Relations](https://www.cfr.org/ukraine/ukraine-conflict-at-the-crossroads-of-europe-and-russia/p27877), Dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024.

Jonathan Guyer, "How America's NATO Expansion Obsession Plays into the Ukraine Crisis," <https://www.vox.com/2290013/nato-ukraine-russia-crisis-clinton-expansion>, dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2024.

Reuters, "What would happen if Ukraine joined NATO?" Europe, <https://www.reuters.com/world/europe/what-would-happen-if-ukraine-joined-nato-2023-07-05/>, Dikunjungi pada tanggal 7 November 2024.

United Nations Human Rights Office of High Commissioner, "UN Commission of Inquiry: Statement on 1000 days of Russia's full-scale invasion of Ukraine".

- <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/11/un-commission-inquiry-statement-1000-days-russias-full-scale>, dikunjungi pada tanggal 29 November 2024.
- UN Meetings Coverage and Press Releases, “*Russian Federation’s Attacks on Ukraine Causing Uptick in Civilian Deaths, Damage to Infrastructure, Black Sea Ports, Senior Official Tells Security Council*”, <https://press.un.org/en/2024/sc15857.doc.htm>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2024.
- BBC News Europe, *Chernihiv: Are these Russia's weapons of war?*, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-europe-61036880>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025.
- Radio Free Europe: Radio Liberty, “*UNESCO Says At Least 53 Cultural Sites In Ukraine Damaged In War*” <https://www.rferl.org/a/ukraine-unesco-endangered-sites-russia/31782483.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025.
- AL JAZEERA, “*UN suspends Russia from human rights body: How your country voted*,” <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/8/russia-suspended-from-un-human-rights-body-how-countries-voted>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2024.
- United Nations, “*General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from Human Rights Council, Continuing Emergency Special Session on Humanitarian Crisis in Ukraine*”, Eleventh Emergency Special Session, <https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2024.
- Deutsche Welle, “*Ukraine: ICC to investigate suspected war crimes — as it happened*”. <https://www.dw.com/en/ukraineicc-to-investigate-suspected-warcrimes-as-it-happened/a-60977270>, diakses pada tanggal 8 November 2024.
- Lieber Institute, “*Understanding Self-Defense and The Law of Armed Conflict*,” 2021, <https://lieber.westpoint.edu/understanding-self-defense-law-armed-conflict/>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025.